

INTISARI

Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) menempatkan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagai salah satu prasyarat utama bagi legalitas usaha dan aktivitas ekspor. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar pelaku ekspor berasal dari kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki variasi pemahaman serta kapasitas berbeda dalam memenuhi kewajiban. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana eksportir menafsirkan, menampilkan, dan menjalankan kepatuhan terhadap komitmen pengelolaan lingkungan dalam OSS RBA, serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan diperkaya dengan kerangka *Institutional Theory* dan perspektif dramaturgi (*Symbolic Interactionism*) untuk membaca kepatuhan sebagai performa sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan eksportir berada dalam spektrum performatif yang berlapis, mulai dari kepatuhan simbolik, formal/adaptif, substantif, hingga strategis dan sosial-moral. UMK cenderung menunjukkan kepatuhan administratif yang berfokus pada penyusunan dokumen dasar seperti SPPL, sementara perusahaan Non-UMK telah menerapkan praktik pengelolaan lingkungan secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan pengetahuan teknis, kapasitas sumber daya manusia, biaya implementasi, serta ketidakpastian informasi terkait kewajiban OSS RBA. Selanjutnya, peran Disperindag DIY sebagai fasilitator ekspor sangat penting, tetapi pembinaan teknis lingkungan masih perlu diperkuat agar mampu mendorong UMK bergerak dari kepatuhan simbolik menuju kepatuhan yang lebih substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap OSS RBA bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan proses sosial yang dipengaruhi tekanan regulatif, ekspektasi pembeli global, nilai budaya, serta strategi perusahaan dalam mempertahankan legitimasi. Temuan ini memberikan implikasi bagi penguatan pembinaan pemerintah daerah, pengembangan kapasitas internal perusahaan, serta penyusunan kebijakan pendukung kepatuhan berkelanjutan di sektor ekspor.

Kata kunci: dramaturgi kepatuhan, OSS RBA, kepatuhan lingkungan, eskportir Yogyakarta, *institutional theory*.

ABSTRACT

The implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) system places environmental management obligations as one of the main prerequisites for business legality and export activities. In the context of the Special Region of Yogyakarta, most exporters come from the category of Micro and Small Enterprises (MSEs), which have varying levels of understanding and different capacities in fulfilling these obligations. This study aims to understand how exporters interpret, present, and carry out compliance with environmental management commitments in the OSS RBA, as well as to identify the challenges they face. The data were analyzed using thematic analysis and enriched with the Institutional Theory framework and a dramaturgical perspective (Symbolic Interactionism) to interpret compliance as a social performance.

The findings show that exporters' compliance behavior exists within a layered spectrum of performance, ranging from symbolic, formal/adaptive, substantive, to strategic and socio-moral compliance. MSEs tend to demonstrate administrative compliance, focusing on the preparation of basic documents such as SPPL, while non-MSE companies have implemented more structured and integrated environmental management practices. The main challenges encountered include limited technical knowledge, human resource capacity, implementation costs, and uncertainty in information related to OSS RBA obligations. The role of the Yogyakarta Department of Industry and Trade (Disperindag DIY) as an export facilitator is highly important, yet technical environmental guidance still needs strengthening to help MSEs move from symbolic to more substantive compliance. This study emphasizes that compliance with OSS RBA is not merely an administrative fulfillment, but a social process influenced by regulatory pressures, global buyer expectations, cultural values, and company strategies for maintaining legitimacy. These findings provide implications for strengthening local government guidance, enhancing internal company capacity, and formulating supportive policies for sustainable compliance in the export sector.

Keywords : dramaturgical compliance, OSS RBA, environmental compliance, Yogyakarta exporters, institutional theory.